

ABSTRAK

Ade Kurniawan : *Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Menjaga Keamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.*

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan kondisi geografis yang sangat strategis. Hal ini tentunya menguntungkan Indonesia baik dari segi ekonomi, geopolitik, maupun geostrategi. Akan tetapi kondisi tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap sumber daya alam dan kelautan Indonesia. Praktik selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai instansi belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia secara maksimal. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, merupakan dasar hukum pembentukan Bakamla yaitu lembaga Pemerintah non kementerian yang dibentuk untuk menjadi badan koordinator dari instansi terkait kelautan lainnya dalam menegakkan hukum dan menjaga stabilitas keamanan wilayah laut Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implikasi Bakamla dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kelautan NKRI, mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum di wilayah kelautan NKRI, dan koordinasi Bakamla dengan instansi lain yang memiliki satgas patroli di wilayah kelautan NKRI berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Tesis ini dilandaskan pada beberapa teori, diantaranya: Teori lembaga negara, teori kewenangan, dan teori penegakan hukum. Peneliti melakukan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dimana studi literatur menjadi bahan pokok dalam penulisan Tesis ini.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa implikasi Bakamla dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kelautan Indonesia dilaksanakan secara faktual dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemantauan, pemeriksaan, pengamatan, komando dan pengendalian (Kodal) serta tindakan hukum di atau lewat laut dengan sistem teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan alat deteksi dini *early warning system* (EWS). Terkait kewenangan Bakamla sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan adalah melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut serta mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah kelautan Indonesia. Koordinasi Bakamla dengan instansi kelautan lainnya dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali dengan sistem *single agency multy tasks*.

Kata Kunci: **Badan keamanan Laut (Bakamla), kewenangan, Penegakan Hukum.**

ABSTRACT

Ade Kurniawan: *The Authority of the Marine Security Agency (Bakamla) in Maintaining Security and Law Enforcement in the Marine Area of the Unitary State of the Republic of Indonesia According to Law No. 32 of 2014 concerning Marine Affairs.*

Indonesia is one of the largest island countries in the world with very strategic geographical conditions. This certainly benefits Indonesia both in terms of economy, geopolitics, and geostrategy. However, these conditions can pose a threat to Indonesia's natural and marine resources. The practice has so far shown that law enforcement, security and safety at sea implemented by patrol units from various agencies have not been able to create maximum marine security in Indonesian waters. The enactment of Law No. 32 of 2014 concerning Marine Affairs, is the legal basis for the establishment of Bakamla, a non-ministerial Government agency formed to be the coordinating body of other marine-related agencies in enforcing the law and maintaining the stability of indonesia's marine area security.

The purpose of this study is to describe and analyze the Implications of Bakamla in maintaining security stability in NKRI marine areas, describe and analyze Bakamla's authority in law enforcement in NKRI marine areas, and Bakamla's coordination with other agencies that have patrol task forces in the NKRI marine area based on Law number 32 of 2014 concerning Marine Affairs.

This thesis is based on several theories, including: Theory of state institutions, theory of authority, and theory of law enforcement. Researchers conducted skin research. This research uses analytical descriptive research methods with a normative juridical approach where literature studies become a staple in the writing of this Thesis.

Based on the results of the study, it was concluded that Bakamla's implications in maintaining security stability in indonesia's marine areas were carried out factually with facilities and infrastructure supporting monitoring, examination, observation, command and control (Kodal) activities and legal actions at or by sea with Communication Information Technology (ICT) systems and *early warning system early detection tools*. (EWS). Regarding Bakamla's authority in accordance with what is stated in Law No, 32 of 2014 concerning Marine is to conduct an instantaneous pursuit, dismiss, inspect, arrest, carry and hand over the ship to the relevant agencies authorized for the implementation of further legal processes and integrate security and safety information systems in Indonesian marine areas. Bakamla's coordination with other marine agencies is carried out in an integrated and integrated manner in a single command and control unit with *a single agency multy tasks system*.

Keywords: Marine Security Agency (Bakamla), Authority, Law Enforcement